

ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP LAPORAN OPINI AUDIT PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

Chindy Larasati Anamuli¹; I Nyoman Agus Wijaya²
Universitas Kristen Maranatha, Bandung^{1,2}
Email : aguswijaya.inyoman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap opini audit pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Alor. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana mereka dapat mencapai kualitas tinggi untuk laporan keuangan dan pada akhirnya akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari fenomena pemerintah daerah (Kabupaten Alor) yang dalam 3 tahun terakhir belum mendapatkan opini WTP. Penelitian ini dilakukan dengan memproses data kualitatif dan data kuantitatif menggunakan metode campuran. Hal ini merupakan metode baru untuk mengukur kualitatif atas laporan keuangan dengan penelitian kualitatif dan pengaruhnya terhadap opini audit WTP menggunakan penelitian kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Alor. Penelitian ini menggunakan pegawai yang bekerja dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Alor sebagai sampel penelitian ini.

Hasil dari Penelitian ini menemukan bahwa dengan meningkatkan pengelolaan atas aset akan meningkatkan transparansi data dan akhirnya akan meningkatkan kualitas atas laporan keuangan. Dengan meningkatkan transparansi data dalam mengelola aset akan meningkatkan potensi mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Alor.

Kata kunci : Transparansi Data; Kualitas Laporan Keuangan; Opini Wajar Tanpa Pengecualian

ABSTRACT

This study aim to identify determinant factor enhancing of financial statement quality and the effect of audit opinion in Government Regional Financial Agency and Assets. The result of this study will be usefulness for Local Government to know how they can achieve higher quality of financial statement and ultimately they can get unqualified opinion. This study conducted based from phenomena that Local Government never get unqualified opinion in the three last year. This study conducted with processing qualitative and quantitative data used mix method. This is the new method to measuring the quality of financial statement with qualitative research and the effect to audit opinion with quantitative research. Data obtained by inquiry and observe in Government Regional Financial Agency and Assets. We used people that work in Government Regional Financial Agency and Assets as sample in this study.

The result of this study found that with improvement to maintenance of assets will increase transparency data and ultimately will increase the quality of financial statements. With increase the data transparency in maintenance of assets will increase

potential of getting unqualified opinion for financial statement in Government Regional Financial Agency and Assets

Keywords : Transparency Data; Quality of Financial Statement; Unqualified Opinion

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi mampu mempermudah segala aktivitas manusia. Penggunaan teknologi juga membuka akses bagi setiap orang untuk menjelajahi dunia melalui internet. Perkembangan teknologi melalui globalisasi terus mendekatkan setiap orang kepada banyak informasi dan data. Hal inilah yang mendorong adanya akuntabilitas dan keterbukaan pada aktivitas-aktivitas yang dianggap penting. Praktik reformasi di bidang keuangan, termasuk di Indonesia, juga menuntut ketersediaan informasi pada sektor publik.

Tuntutan adanya akuntabilitas dan keterbukaan juga berlaku pada lingkup organisasi. Pemerintah daerah berperan sebagai entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah RI, 2006) dikarenakan penggunaan sumber daya oleh pemerintah dianggap harus memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Partono, 2000). Bersamaan dengan hal tersebut, tujuan laporan keuangan menurut International Federation of Accountants (IFAC, 2014) adalah menyediakan informasi tentang entitas pelaporan yang dapat berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan operasional melalui laporan keuangan yang harus dibuat dengan kualitas yang tinggi yang mana harus memenuhi aspek relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, laporan tersebut kemudian akan diperiksa secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan meningkatkan kredibilitas laporan tersebut melalui penerbitan opini audit. Peranan kualitas laporan dan juga opini dari Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan mampu untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Secara umum, siklus akuntansi dapat dilihat dari model adaptasi dari Hanaffi (2017) sebagai berikut:

Lihat Gambar 1

Pada pencatatan berbasis akrual, penerimaan dan pengeluaran dicatat atau diakui ketika transaksi terjadi. Pengakuan ini termasuk pada pengakuan pendapatan-LO, aset, beban, ekuitas, dan kewajiban (Yusuf et al, 2021). Hal ini berpengaruh pada

terbebasnya pencatatan dari pengaruh waktu, sebagai contoh, saat pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan. Pencatatan berbasis akrual akan dapat menggambarkan informasi atas operasi atau kegiatan yang dicatat dalam jenis laporan tertentu, sehingga hal ini dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan (Umar et al, 2021). Secara umum, pencatatan berbasis akrual akan dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Adapun proses penyusunan laporan keuangan, diperlukan aplikasi yang mampu mengendalikan keseluruhan proses pencatatan kejadian dan peristiwa keuangan (Yusuf et al, 2021). Di Indonesia pemerintah memberlakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang transparan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian menghasilkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

SAKIP merupakan penyatuan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mendukung prinsip akuntabilitas pemerintah. LAKIP yang merupakan produk akhir dari SAKIP berisi tentang perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja. Perencanaan kinerja dapat meliputi rencana strategis dan perjanjian kinerja. Akuntabilitas kinerja dapat meliputi pencapaian, efisiensi, dan realisasi dari program-program yang dijalankan (Laporan Kinerja Kabupaten Alor, 2020). Dengan pengembangan sistem akuntabilitas serta pelaporan kinerja, hal ini dapat mendukung pencapaian pelaporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Lihat Gambar 2

Berdasarkan hasil dari BPK (2020), dalam rentang tahun 2016-2019, jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan predikat opini TMP mencapai 91 LKPD. Dalam rentang tahun yang sama juga, BPK memberikan predikat WDP sebanyak 584 LKPD. Pada semester I tahun 2020, BPK telah menyusun 541 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi temuan pemeriksaan serta rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Dari 541 LHP tersebut didapatkan total sebanyak 6.160 temuan melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari temuan tersebut, 2.147 temuan menyebabkan kerugian mencapai Rp898,30 miliar. Adapun 359 temuan memiliki potensi kerugian mencapai 342,86 miliar.

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang memegang peran sebagai entitas pelaporan. Kabupaten Alor dalam hal ini wajib untuk menyusun LKPD sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. LKPD ini juga akan diperiksa oleh BPK hingga kemudian dikeluarkan sebuah opini atas hasil pemeriksaan.

Lihat Tabel 1

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2019, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan peningkatan pendapatan Masyarakat yang mana hal ini sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis kualitas laporan keuangan melalui indikator-indikator tertentu. Hasil analisis kualitas laporan keuangan tersebut kemudian dihubungkan dengan laporan audit dari BPK. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang berupaya menganalisis antara variabel kualitas laporan keuangan dan hubungannya terhadap laporan audit.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengembangan Hipotesis

Beberapa variabel dalam pengelolaan keuangan pelaporan keuangan. Herindraningrum dan Yuhertiana (2021) dalam literature review yang dibuatnya mengemukakan terdapat banyak sekali penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbagai penelitian pun menghasilkan kajian yang relatif bervariasi dengan ditemukannya hasil-hasil penelitian yang berbeda.

Pengelolaan laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku di BPK bahwa laporan keuangan harus berdasar pada asas transparansi. Asas transparansi ini merupakan aspek paling fundamental yang menuntut kesadaran dan keseriusan semua pihak terkait untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk profesionalitas kerja. Tuntutan ini tentu melibatkan semua sektor seperti masyarakat umum, lembaga swadaya, dan tentunya pemerintah. Meskipun demikian, pihak terkait yang menjadi titik tumpu dalam merealisasikan tujuan ini adalah pemerintah (Sangki, 2017).

Berikut ringkasan isi dari LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019:

- 1) Pemerintah Kabupaten Alor menyajikan saldo Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing senilai Rp481.821.306.602,00, Rp641.818.038.179,00, Rp1.008.426.573.518,72, dan Rp57.670.472.906,86.
- 2) Dari nilai-nilai tersebut, terdapat laporan atas Tanah sebanyak 83 bidang pada 43 SDN dan 58 SMPN belum mencatat gedung dan bangunan serta 64 gedung pada 10 sekolah belum dapat dicatat, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp88.246.008.610,00,
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp24.281.120.131,00 belum dapat ditelusuri kejelasan status penyelesaiannya. Di lain sisi, semua nilai tersebut belum mampu teridentifikasi secara aktual oleh BPK karena kurangnya bukti pemeriksaan yang dibutuhkan dalam data yang dimiliki perangkat daerah setempat. Dengan begitu, keputusan terkait langkah penyesuaian yang seharusnya dilakukan terhadap nilai tersebut tidak dapat direalisasikan oleh BPK. Akun Aset tersebut termasuk kepada Belanja Modal.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp204.796.163.369,00, jika dibandingkan anggaran belanja sebesar Rp227.570.612.259,00, maka terbaca realisasi kurang dari anggaran sebesar Rp22.774.448.890,00 atau 89,99%.

Priharjanto dan Wardani (2016) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh opini dalam laporan audit. Hal ini juga didukung penelitian Sasmita (2021) yang mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh faktor sudut pandang atau opini audit yang diberikan BPK. Pemberian opini audit tersebut mempunyai berbagai macam kriteria, salah satunya berkaitan dengan kecukupan pengungkapan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sasmita (2021) juga berupaya untuk mengungkap hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dan opini audit serta hubungannya dengan kualitas laporan keuangan. Pada penelitian ini, Sasmita (2021) mengemukakan bahwa opini dalam laporan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan landasan teori yang sudah dikemukakan, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara kualitas laporan keuangan dan laporan opini audit. Dengan menggunakan karakteristik kualitas laporan keuangan, diharapkan dapat

diketahui relevansinya terhadap laporan audit. Dari Pemahaman diatas , maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Daya Serap Anggaran berpengaruh positif terhadap Laporan Opini Audit.

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Laporan Opini Audit.

H3 : Liabilitas (X3) berpengaruh positif terhadap Laporan Opini Audit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Metode Campuran. Menurut Creswell & Clark (2018:7) Penelitian Metode Campuran adalah suatu desain penelitian yang mengandung asumsi filosofi dan metodologi penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian metode campuran adalah peneliti itu sendiri. Pada penelitian metode campuran ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif dari rangkaian proses wawancara dan data kuantitatif dari hasil audit BPK dan Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah. Jenis desain pada metode campuran ini adalah desain eksplanatori, jenis analisis data metode campuran eksplanatori sendiri adalah menghubungkan analisis data untuk menjelaskan hasil-hasil temuan.

Sampel Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang mana responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu Kepala Badan Keuangan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. Data akan diolah juga melalui beberapa tahap dan model **uji Analisis Regresi linier berganda**.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Lihat Tabel 2

- Pada tahun 2016, diketahui bahwa Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan aset tetap tanah sebesar Rp 84.222.254.425, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 267.876.190.930, gedung dan bangunan sebesar Rp 437.664.595.67, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 692.480.963.284, aset tetap lainnya sebesar Rp 23.184.332.528, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 87.557.286.677, dan akumulasi penyusutan aset tetap Rp 436.691.744.526.

- Pada tahun 2017, diketahui bahwa Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan aset tetap tanah sebesar Rp86,781,367,075, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp292,055,482,307, gedung dan bangunan sebesar Rp446,811,574,495, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp767,540,449,798, aset tetap lainnya sebesar Rp19,441,617,394, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp139,989,601,110, dan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp504,939,797,507
- Pada tahun 2018, diketahui bahwa Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan aset tetap tanah sebesar Rp87,187,022,905, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp325,512,711,527, aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp538,275,478,404, aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp957,287,122,053, aset tetap lainnya sebesar Rp25,504,478,099, dan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp84,786,814,428 dan akumulasi penyusutan aset tetap Rp868,948,529,781
- Pada tahun 2019, diketahui bahwa Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan aset tetap tanah sebesar Rp481,821,306,602, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp351,329,426,375, gedung dan bangunan sebesar Rp641,818,038,179, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1,008,426,573,518, aset tetap lainnya sebesar Rp22,748,638,967, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp57,670,472,906, dan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp1,239,600,635,999
- Pada tahun 2020, diketahui bahwa Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan aset tetap tanah sebesar Rp499,081,847,872, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp399,405,758,424, gedung dan bangunan sebesar Rp710,314,368,009, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1,004,107,901,840, aset tetap lainnya sebesar Rp23,637,940,963, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp45,486,776,105, dan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp877,732,812,451

LHP dari BPK yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang mana BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2015. Opini tersebut dikeluarkan karena terdapat sisa Kas di Bendahara yang belum disetorkan ke Kas Daerah untuk periode sebelum TA 2015 sebesar Rp316.501.624,00 dan sisa saldo bank sebesar Rp168.216.762,00 pada enam SKPD yang tidak tercatat dalam Neraca dan masih ditelusuri peruntukannya; kelemahan penatausahaan dan penyajian Aset Tetap antara lain belum dilakukan inventarisasi

secara menyeluruh, Aset Tetap senilai Rp3.057.193.425,00 jumlah unitnya tidak diketahui, senilai Rp92.207.591.688,00 tidak didukung dengan keterangan barang dan kodefikasi barang, senilai Rp13.135.327.513,16 tidak diketahui keberadaannya, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp152.142.947.626,00 tidak didukung dengan keterangan data jalan, dan Aset Tetap dikelola pihak lain belum didukung dengan BAST; Aset Lain-lain berupa selisih kas sebesar Rp9.252.750.474,92 dan sisa kas belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara sebesar Rp135.844.373,00 karena tidak didukung oleh bukti asli; dan Beban Barang dan Jasa belum memasukkan unsur beban yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp34.760.813.166,00. Pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan upaya perbaikan diantaranya menyelesaikan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dengan penyetoran dan penerbitan SKTJM serta dengan menyajikan Beban Barang dan Jasa atas Dana BOS.

Dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor terdapat kelemahan pengendalian intern mana inventarisasi belum dilakukan secara menyeluruh, Aset Tetap senilai Rp3.057.193.425,00 jumlah unitnya tidak diketahui dan senilai Rp13.135.327.513,16 tidak diketahui keberadaannya, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp45.985.696.942,00 tidak didukung dengan keterangan data jalan, Aset Tetap senilai Rp1.884.078.097,00 dikelola pihak lain belum didukung dengan BAST, Aset Tetap tanah atas 63 ruas jalan kabupaten sepanjang 748,24 kilometer belum dicatat, Aset Tetap senilai Rp16.881.677.136,00 yang nilainya berada di bawah nilai kapitalisasi masih tercatat, Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS belum tercatat, dan Aset Tetap berupa 63 unit kendaraan bermotor tidak diketahui keberadaannya. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk dapat meyakini nilai Aset Tetap tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi. Berikut hasil uji Normalitas dalam penelitian ini:

Lihat Tabel 3

Sesuai dengan tabel di atas, didapatkan nilai asymp. Sig sebesar 0.053, yang berarti bahwa nilai Asymp.sig > 0.05, yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan antar pengamatan ke pengamatan yang lain menggunakan grafik scatter plot (Ghozali 2016:139). Berikut hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Lihat Tabel 4

Hasil Uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa variable yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji Multikolinearitas dalam penelitian ini:

Lihat Tabel 5

Dari tagel diatas dapat dilihat bahwa, Daya Serap Anggaran (X1) memiliki nilai VIF sebesar 6.340 Profitabilitas (X2) memiliki nilai VIF sebesar 7.199, dan Liabilitas (X3)k memiliki nilai VIF sebesar 1.587. Karena nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Berikut hasil uji Autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 6

Berdasarkan tabel di atas, didapat nilai D-W sebesar 1.883 yang berarti bahwa hasil perhitungan ini berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Uji Hipotesis

Dengan taraf kepercayaan 95%, maka hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

- H1 : Daya Serap Anggaran (X1) berpengaruh positif terhadap Laporan Opini Audit (Y).
- H2 : Profitabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap Laporan Opini Audit (Y).
- H3 : Liabilitas (X3) berpengaruh positif terhadap Laporan Opini Audit (Y).

Berikut hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini:

Lihat Tabel 7

- Untuk Uji Hipotesis 1, didapat nilai signifikansi sebesar 0.021 yang berarti nilai signifikan < 0,05 yang yang berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh

terhadap variabel dependen (H_0 ditolak dan H_1 diterima), yang berarti bahwa Daya Serap Anggaran (X_1) berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit (Y)

- Untuk Uji Hipotesis 2, didapat nilai signifikansi sebesar 0.023, yang berarti nilai signifikan $\leq 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen (H_0 ditolak dan H_2 diterima), yang berarti bahwa Profitabilitas (X_2) berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit (Y).
- Untuk Uji Hipotesis 3, didapat nilai signifikansi sebesar 0.049, yang berarti nilai signifikan $\leq 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen (H_0 ditolak dan H_3 diterima), yang berarti bahwa Liabilitas (X_3) berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit (Y).

Uji regresi linier berganda

Kami menguji hipotesis menggunakan Uji Regresi Linear Berganda yang mana pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). Hipotesis juga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tidak diterima jika nilai signifikan $> 0,05$ yang dimana artinya tidak berpengaruh signifikan pada variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Diterima jika nilai signifikan $\leq 0,05$ yang dimana artinya adanya pengaruh signifikan pada variabel independen.

Untuk Uji regresi secara simultan, didapat nilai signifikansi sebesar 0.000, yang berarti bahwa nilai signifikan $\leq 0,05$ yang yang berarti terdapat pengaruh signifikan pada variabel independen terhadap dependen. Dengan demikian, terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Kualitas laporan Keuangan (Daya Serap Anggaran (X_1), citra merek, dan Liabilitas (X_3)) terhadap Laporan Opini Audit (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil uji Koefisien Determinasi yang telah kami lakukan.

Lihat Tabel 8

Lihat Tabel 9

$$KD = \text{adjusted } r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0.382 \times 100\% = 38.2\%$$

Dengan demikian, pengaruh secara bersama-sama dari Daya Serap Anggaran (X_1), citra merek, dan Liabilitas (X_3) terhadap Laporan Opini Audit (Y) adalah sebesar 38.2%.

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang memegang peran sebagai entitas pelaporan. Kab. Alor dalam hal ini wajib untuk menyusun LKPD sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. LKPD ini juga akan diperiksa oleh BPK hingga kemudian dikeluarkan sebuah opini atas hasil pemeriksaan.

Laporan keuangan pemerintah perlu disajikan dengan kualitas yang baik, kualitas yang baik dapat di nilai dari pelaporan kinerja pemerintah, baik yang berwujud dan tidak berwujud. Adapun yang dimaksud kualitas berwujud dapat meliputi aset-aset dalam pengelolaan. Sementara itu, yang dimaksud tidak berwujud merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam suatu periode. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Didapatkan Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki rata-rata sebesar 4.16, yang berarti bahwa laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor memiliki kualitas yang tinggi.

Dari hasil uji hipotesis, terdapat pengaruh Kualitas laporan Keuangan Daya Serap Anggaran, citra merek, dan Liabilitas terhadap Laporan Opini Audit. selain itu, pengaruh secara bersama-sama dari Daya Serap Anggaran, citra merek, dan Liabilitas terhadap Laporan Opini Audit adalah sebesar 38.2%. Bukan hanya itu, komponen kualitas laporan keuangan yaitu Daya Serap Anggaran, citra merek, dan Liabilitas memiliki pengaruh secara parsial, dimana didapat uji hipotesis minor dimana Daya Serap Anggaran berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit, Profitabilitas berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit, dan Liabilitas berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I menyebutkan bahwa sepanjang 2015-2019, Kab. Alor selalu mendapatkan predikat opini WDP. Hasil ini diberikan karena akun aset tetap pada laporan keuangan tidak disajikan sesuai SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup pada pemeriksaan LKPD tahun 2019.

Analisis Hasil Transkrip Wawancara

Menurut mewawancarai Ibu Dewi Paulina Riwoe Odja, SE., selaku kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa untuk tahun 2016 sampai 2019 memang opini yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor menerima Opini Wajar Dengan

Pengecualian. Adanya opini terutama didapatkan karena adanya masalah aset yang terjadi, BPK dalam melakukan pemeriksaan untuk aset tetap tidak secara keseluruhan karena keterbatasan waktu sehingga ada catatan-catatan berkaitan dengan pengelolaan aset tetap yang belum dituangkan pada LHP tahun-tahun sebelumnya sehingga pihak BKAD terutama bidang aset harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aset tetap yang ada di catatan rekomendasi. Menurut Ibu Dewi Paulina, saat ini BKAD terutama dalam bidang aset, dan Inspektorat, terutama memiliki masalah terkait dengan pensertifikasian tanah, yang membuatnya harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Alor dan berkoordinasi dengan pihak Samsat untuk kepemilikan kendaraan-kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sejak berdiri dari tahun 1958 kewalahan untuk memetakan aset, karena definisi aset tetap dan pengakuan aset tetap juga berbeda, sehingga usaha yang dilakukan adalah mengurai dan ditindaklanjuti oleh OPD.

Informasi ini didukung juga Dengan wawancara dengan Bapak Amrullah Bay SE. selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor, penelusuran aset yang dilakukan oleh bidang aset memang keseluruhan OPD itu belum semuanya dilakukan secara langsung. Pihak Pemda melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang melalui laporan pemeriksaan BPK ditemukan hal-hal yang masih terjadi kejanggalan maka ini akan dilakukan penelusuran khusus terhadap ah OPD-OPD yang dianggap asetnya bermasalah. Lebih lanjut lagi, Bapak Amrullah mengungkapkan bahwa Strategi yang digunakan berdasar rekomendasi BPK maka bidang aset bekerjasama dengan bidang akuntansi bersama inspektorat daerah untuk melakukan penelusuran secara langsung ke objek yang menjadi sasaran temuan BPK, jadi untuk percepatan itu memang harus ada koordinasi antar sektor baik dengan BPK bidang akuntansi, dengan Irda maupun OPD-OPD yang dianggap memiliki masalah terkait aset yang ada dalam penguasaannya. Untuk membantu hal ini, di Pemkab Alor tersedia Aplikasi yaitu SIMDA BMD sistem informasi manajemen pemerintah daerah terkait barang milik daerah yang tersedia jadi di sini tersedia SIMDA yang dimana dalam sistem aplikasi itu sudah tersedia akun akun pencatatan aset yang harus kita menginput data aset kedalamnya.

Di sisi lain, Bapak Mese mengungkapkan bahwa kendala dalam mengkompilasi atau menggabungkan laporan keuangan OPD jadi laporan keuangan pemerintah daerah sebagian besar pihak-pihak yang terkait didalam pengelolaan keuangan atau penyusunan laporan keuangan SKPD belum mampu menyajikan laporan SKPD sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pemerintahan dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia terutama PPK yang latar belakang pendidikannya bukan sarjana Ekonomi lebih khususnya yang bukan bidang akuntansi begitu, yang kedua masih minim dalam keterlibatan untuk mengikuti int/bimtek atau pelatihan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, yang ketiga pemanfaatan SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD dalam penyusunan laporan SKPD belum maksimal. Dengan demikian, hal ini dapat membuat adanya Kualitas Laporan Keuangan Kualitas Laporan Keuangan masih belum maksimal, dan masih dapat ditingkatkan dengan lebih baik di kemudian hari.

Sementara, untuk variabel berikutnya yaitu Laporan hasil audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dari hasil audit berdasarkan standar serta pengendalian mutu yang menjadi pedoman bagi para auditor dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, Sunarsih et al. (2021) juga menjelaskan bahwa laporan audit memuat opini audit sebagai hasil penelaahan oleh auditor. Opini ini berupa pernyataan standar yang dijadikan kesimpulan dari keseluruhan proses audit. Dalam proses ini, auditor dapat menemukan dan melaporkan tentang adanya pelanggaran sistem atau prinsip akuntansi kepada organisasi yang diaudit. Didapat rata-rata sebesar 4.29, yang berarti bahwa Hasil audit yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor memiliki kualitas yang tinggi

Menurut Ibu Dewi Paulina Saat ini, untuk mengatasi masalah yang dihadapi, maka dilakukan rapat-rapat koordinasi, memetakan, mengidentifikasi, menginventarisir semua catatan-catatan rekomendasi yang selanjutnya secara lengkap, kemudian hasil tersebut disampaikan kepada OPD untuk bagaimana OPD menindaklanjuti sebagai pengguna, dimana pengguna barang pada Pemerintah Daerah adalah OPD sehingga yang menindaklanjuti harus dari dari OPD. Peranan dari BKAD adalah mengarahkan bersama inspektorat, dan meminta OPD untuk menindaklanjuti

semua rekomendasi bidang aset dan Inspektorat juga melakukan evaluasi, sebelum BPK melakukan audit lagi untuk tahun anggaran selanjutnya.

Menurut Ibu Dewi Paulina juga terkait dengan kualitas laporan keuangan, Ibu Kaban mengungkapkan ada nilai ini berkaitan dengan Aset lancar, Aset tetap, kewajiban, dan ekuitas yang mana rincian-rincian itu bisa terbaca pada Neraca daerah yang akan didukung pada Laporan-laporan lainnya. Data yang disajikan dipastikan didukung dengan data yang tersedia dan melibatkan BPK dalam pemeriksaan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Amrullah, secara umum, terkait tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemda memang bidang aset maka Pemda bekerja sama dengan inspektorat, dimana Bapak Bupati sudah membangun kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Alor untuk menyelesaikan semua aset-aset yang dianggap bermasalah, jadi sudah ada langkah konkrit yang diambil pemda melalui MOU yang dibuat untuk bisa menyelesaikan aset-aset yang dianggap bermasalah. Hal ini menggamarkan langkah positif yang baik untuk mendorong penyelesaian masalah.

Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Mese mengungkapkan bahwa Strategi yang digunakan oleh Pemda Alor yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan SIMDA BMD dan SIMDA keuangan, untuk SIMDA BMD diharapkan dapat memberikan data yang akurat terkait dengan aset yang ada di kabupaten alor sedangkan untuk SIMDA Keuangan terkait keakuratan data dalam pengelolaan keuangan daerah, yang kedua meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan bimtek ataupun sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang penatausahaan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan demikian, pihak Pemda telah berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sesuai dengan standar yang ada.

Untuk Uji Hipotesis, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.000, yang berarti bahwa nilai signifikan 0.000 < 0,05 yang dimana artinya adanya pengaruh signifikan pada variabel independen. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Laporan Audit. Didapat bahwa besarnya pengaruh antara Kualitas Laporan Keuangan terhadap Laporan Audit adalah sebesar 36.8%, Karenanya Kualitas laporan keuangan akan berkontribusi dengan Laporan Audit.

Hal ini sangat mendukung keterangan dimana adanya kualitas yang baik akan dapat mendorong laporan audit yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Albajili, dimana Penggunaan sistem informasi manajemen daerah, pengendalian internal, serta pemahaman sumber daya manusia terkait akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hal ini didukung fakta empiris dimana menurut Ibu Dewi Paulina Untuk bisa mencapai WTP, Pihak pemerintah daerah mengidentifikasi dulu semua catatan rekomendasi yang ada berkaitan dengan pengelolaan aset, pengelolaan kas, dan yang lainnya sesuai catatan yang tertuang pada LHP buku II maupun buku III, berkaitan dengan Sistem pengendalian intern, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan-permasalahan maka lembaga terkait akan membedah permasalahan dan melakukan rapat-rapat koordinasi, setelah melakukan rapat-rapat koordinasi, dengan mengacu pada catatan rekomendasi, maka akan terlihat apa yang harus di tindaklanjuti, yang memungkinkan pemerintah daerah membangun komunikasi koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut : Terdapat pengaruh Kualitas laporan Keuangan (Daya Serap Anggaran (X1), Profitabilitas (X2), dan Liabilitas (X3) terhadap Laporan Opini Audit (Y).

Pada komponen kualitas laporan keuangan yaitu Daya Serap Anggaran (X1), Profitabilitas (X2), dan Liabilitas (X3) memiliki pengaruh secara parsial, dimana didapat uji hipotesis minor dimana Daya Serap Anggaran (X1) berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit (Y), Profitabilitas (X2) berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit (Y), dan Liabilitas (X3) berpengaruh terhadap Laporan Opini Audit (Y).

Dalam Penelitian ini hanya memiliki 1 Objek penelitian yaitu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. Saran dari Penulis untuk pemerintah daerah setempat adalah Variabel Kualitas laporan Keuangan (Daya Serap Anggaran (X1), Profitabilitas (X2), dan Liabilitas (X3)) terhadap Laporan Opini Audit (Y) yang berarti pihak Pemda harus dapat mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan yang sudah dilakukan saat ini, Terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Laporan Audit, dimana kualitas laporan keuangan yang baik dapat mendorong kualitas audit, sehingga harus terus ditingkatkan, Memaksimalkan aplikasi

pendukung pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah atau yang disebut SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) dan SIMDA Keuangan, Memaksimalkan SDM yang tersedia sehingga dapat mempertahankan opini WTP yang diberikan oleh BPK. Sementara untuk peneleiti selanjutnya agar bisa mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Albajili, B. (2020). *Pengaruh sistem informasi manajemen daerah (simda) keuangan, pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi pada pemerintah Kabupaten Jember)*. (Doctoral Dissertation). Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2020. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester i tahun 2020. Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihs> pada 20 Mei 2021.
- Creswell & Clark. (2018). *Mendesain dan melaksanakan mixed methods research*. Edisi Bahasa Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Ebenezer, E., & Ferinia, R. (2018). Develop Audit Opinion. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(3), 1-27. <https://doi.org/10.31955/mea.v2i3.44>
- Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. *The Accounting Review*, 79(4), 967-1010.
- Francis, J., Maydew, E., & Sparks, H. (1999). The Role of big 6 auditors in the credible reporting of accruals. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 18(2), 17-34.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS. 21 update PLS regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hanaffi, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pati). *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. *Jurnal at-Taqaddum Volume 8 Nomor 1*, 23-24.
- Herath, S., & Albarqi, N. (2017). Financial reporting quality: A literature review. *International Journal of Business Management and Commerce*, 2(2), 1-14.
- Herindraningrum, F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(01), 76-91.
- Hidayati, N. & Khairulyadi. (2017). Upaya institusi sosial dalam menanggulangi pengemis anak di kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2 Nomor 2*, 750.
- Husein, U. (2016). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- IAI, I. A. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta, Indonesia. Retrieved from <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-7-psak-1-penyajian-laporan-keuangan>.
- IFAC, I. F. (2014). *The conceptual framework for general purpose financial reporting by public sector entities*. International Public Sector Accounting Standards Board.

- IFAC. (2014). *A Framework for Audit Quality. Key Elements That Create an Environment for Audit Quality*. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
- International Federation of Accountants (IFAC). (2014). *The conceptual framework for general purpose financial reporting by public sector entities. International Public Sector Accounting Standards Board*. Copyright by the International Federation of Accountants (IFAC).
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Langelo, F., Saerang, D., & Alexander, S. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 3(1).
- Mania, S. (2018). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 No. 2, 221.
- Martiningsih, R. (2009). Studi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Partono. (2000). Laporan keuangan pemerintah: Upaya menuju transparansi dan akuntabilitas *Media Akuntansi Edisi 10 Juni*.
- Pemda Kab. Alor, P. D. (2020). *Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Alor*. Alor, Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Alor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- PP RI, P. P. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta, Indonesia.
- PP RI, P. P. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta, Indonesia.
- PP RI, P. P. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Indonesia.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. (2016). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97-110.
- Prihatsanti, U., Suryanto, & Hendriani, W. (2018). Menggunakan studi kasus sebagai metode ilmiah dalam psikologi. *Buletin Psikologi Volume 26 Nomor 2*, 126-127.
- Pura, R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 1-13.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33*, 83.

- Saputri, D. M. (2018). *Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sasmita, R. (2021). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap understandability dalam kualitas laporan keuangan. *MODUS Journal*, 33(1), 98-119.
- Simanjuntak, P. (2008). *Pengaruh time budget pressure dan resiko kesalahan terhadap penurunan kualitas audit (Studi empiris pada auditor KAP di Jakarta)*. (Doctoral Dissertation). Program Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartanto, D. (2018). *Metode riset pemasaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, N. M., Munidewi, I. A. B., & Masdiari, N. K. M. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas audit, opini audit, komite audit terhadap audit report lag. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 1-13.
- Tang, Q., Chen, H., & Lin, Z. (2016). How to measure country-level financial reporting quality? *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Thomson, S. (2005). *Acquiring, developing and implementing accounting information systems*. Thomson South-Western.
- Umar, A., Hasan, J., & Katiandagho, S. (2021). Evaluasi implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada laporan keuangan bawaslu Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2018. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 61-74.
- UU RI, U. U. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta, Indonesia.
- Wardani, D., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Wijatiningsih, D. & Prasetyawan, Y. Y. (2019). Penerapan pengajaran literasi informasi bagi pustakawan UPT perpustakaan politeknik negeri semarang: sebuah penelitian metode campuran (mixed methods). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, vol. 6, no. 3, pp. 191-200.
- Yuliani, N., & Agustini, R. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64.
- Yusuf, M., Wijayanto, A., & Andani, P. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Data Penelitian
Hasil Uji Instrumen Penelitian

Analisis Dekriptif Laporan Keuangan

Dimensi	item	SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)		rata-rata	Dimensi
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
Relevan	1	14	32.6%	29	67.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.33	4.180
	2	8	18.6%	34	79.1%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.16	
	3	7	16.3%	33	76.7%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.09	
	4	8	18.6%	33	76.7%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.14	
Andal	5	7	16.3%	32	74.4%	4	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.07	4.177
	6	7	16.3%	34	79.1%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.12	
	7	13	30.2%	27	62.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
	8	10	23.3%	32	74.4%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.21	
	9	13	30.2%	28	65.1%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.26	
Dapat dibandingkan	10	9	20.9%	30	69.8%	4	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.12	4.178
	11	13	30.2%	27	62.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
	12	14	32.6%	23	53.5%	6	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.19	
Dapat Dipahami	13	9	20.9%	31	72.1%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.14	4.093
	14	8	18.6%	23	53.5%	12	27.9%	0	0.0%	0	0.0%	3.91	
	15	12	27.9%	29	67.4%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
Total		152		445		48		0		0		4.16	4.161

Variabel	Dimensi	Rata-rata	keterangan
Kualitas Lapoan Keuangan (X)	Relevan	4.180	tinggi
	Andal	4.177	tinggi
	Dapat dibandingkan	4.178	tinggi
	Dapat Dipahami	4.093	tinggi
TOTAL VARIABEL		4.161	Tinggi

Analisis Dekriptif Laporan Audit

Dimensi	item	SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)		rata-rata	Dimensi
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
Perencanaan Pemeriksaan	1	15	34.9%	25	58.1%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.28	4.30
	2	13	30.2%	27	62.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
	3	14	32.6%	27	62.8%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.28	
	4	18	41.9%	25	58.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.42	
Pelaksanaan Pemeriksaan	5	19	44.2%	22	51.2%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.40	4.32
	6	17	39.5%	25	58.1%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.37	
	7	14	32.6%	26	60.5%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.26	
	8	18	41.9%	23	53.5%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.37	
	9	11	25.6%	29	67.4%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.19	
	10	12	27.9%	31	72.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.28	
	11	16	37.2%	26	60.5%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.35	
Pelaporan Pemeriksaan	12	18	41.9%	22	51.2%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.35	4.26
	13	11	25.6%	30	69.8%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.21	
	14	9	20.9%	33	76.7%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.19	
	15	11	25.6%	31	72.1%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
	16	18	41.9%	22	51.2%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.35	
	17	10	23.3%	31	72.1%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.19	
	18	14	32.6%	28	65.1%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.30	
	19	11	25.6%	30	69.8%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.21	
	20	13	30.2%	27	62.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
	21	15	34.9%	26	60.5%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.30	

Dimensi	item	SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)		rata-rata	Dimensi
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
	22	15	34.9%	27	62.8%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.33	
TOTAL		312		593		41		0		0		4.29	4.29
Variabel	Dimensi			Rata-rata		keterangan							
Laporan Audit (Y)	Perencanaan Pemeriksaan			4.302		sangat tinggi							
	Pelaksanaan Pemeriksaan			4.316		sangat tinggi							
	Pelaporan Pemeriksaan			4.262		sangat tinggi							
TOTAL VARIABEL				4.286		sangat tinggi							

Hasil Uji Instrumen Penelitian

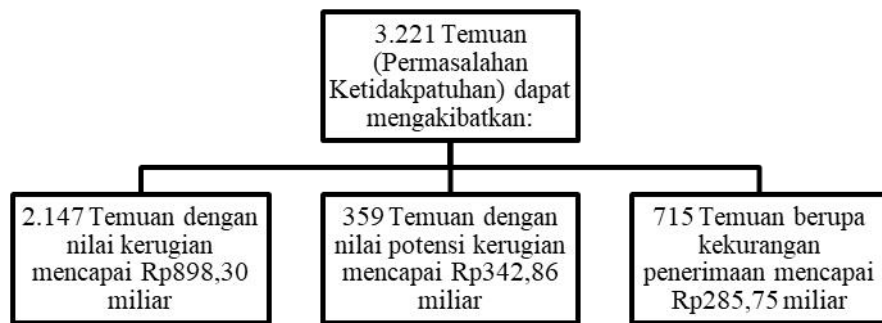
Analisis Deskriptif Laporan Keuangan

Dimensi	item	SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)		rata-rata	Dimensi
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
Relevan	1	14	32.6%	29	67.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.33	4.180
	2	8	18.6%	34	79.1%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.16	
	3	7	16.3%	33	76.7%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.09	
	4	8	18.6%	33	76.7%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.14	
Andal	5	7	16.3%	32	74.4%	4	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.07	4.177
	6	7	16.3%	34	79.1%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.12	
	7	13	30.2%	27	62.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
	8	10	23.3%	32	74.4%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.21	
	9	13	30.2%	28	65.1%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.26	
Dapat dibandingkan	10	9	20.9%	30	69.8%	4	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	4.12	4.178
	11	13	30.2%	27	62.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
	12	14	32.6%	23	53.5%	6	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.19	
Dapat Dipahami	13	9	20.9%	31	72.1%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	4.14	4.093
	14	8	18.6%	23	53.5%	12	27.9%	0	0.0%	0	0.0%	3.91	
	15	12	27.9%	29	67.4%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	4.23	
Total		152		445		48		0		0		4.16	4.161

Variabel	Dimensi	Rata-rata	keterangan
Kualitas Lapoan Keuangan (X)	Relevan	4.180	tinggi
	Andal	4.177	tinggi
	Dapat dibandingkan	4.178	tinggi
	Dapat Dipahami	4.093	tinggi
TOTAL VARIABEL		4.161	Tinggi



Gambar 1 Siklus Akuntansi
Sumber: Adaptasi dari Hanaffi (2017)



Gambar 2 Infografis Data Temuan Beserta Nilai Kerugian yang Dihasilkan
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (BPK, 2020)

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Alor 2018-2019

No.	Uraian	2018	2019
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	5,06	5,10
2.	Peringkat Provinsi	15	15

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Alor (2020)

Tabel 2 Komponen Aset Tetap

Pos Aset	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
aset tetap tanah	84.222.254.425	86.781.367.075	87.187.022.905	481.821.306.602	499.081.847.872
aset tetap peralatan dan mesin	267.876.190.930	292.055.482.307	325.512.711.527	351.329.426.375	399.405.758.424
aset tetap gedung dan bangunan	437.664.595.675	446.811.574.495	538.275.478.404	641.818.038.179	710.314.368.009
aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan	692.480.963.284	767.540.449.798	957.287.122.053	1.008.426.573.518	1.004.107.901.840
aset tetap lainnya	23.184.332.528	19.441.617.394	25.504.478.099	22.748.638.967	23.637.940.963
aset tetap konstruksi dalam pengerjaan	87.557.286.677	139.989.601.110	84.786.814.428	57.670.472.906	45.486.776.105
akumulasi penyusutan aset tetap	436.691.744.526	504.939.797.507	868.948.529.781	1.239.600.635.999	877.732.812.451

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4411756575.413 35400
Most Extreme Differences	Absolute	.273
	Positive	.273
	Negative	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		1.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.639E-008	2520614936.981		.000	1.000
1 Daya Serap Anggaran (X1)	.000	856899.587	.000	.000	1.000
1 Profitabilitas (X2)	.000	3652328.618	.000	.000	1.000
1 Liabilitas (X3)	.000	173675.727	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4088249642.110	2520614936.981		1.622	.110		
1 Daya Serap Anggaran (X1)	31116.553	856899.587	.011	2.036	.021	.158	6.340
1 Profitabilitas (X2)	4403636.521	3652328.618	.388	2.206	.023	.139	7.199
1 Liabilitas (X3)	79371.988	173675.727	.069	2.457	.049	.630	1.587

a. Dependent Variable: Laporan Opini Audit (Y)

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.388	.382	4528386989.63367	1.883

a. Predictors: (Constant), Liabilitas (X3), Daya Serap Anggaran (X1), Profitabilitas (X2)

b. Dependent Variable: Laporan Opini Audit (Y)

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4088249642.110	2520614936.981		1.622	.110
1 Daya Serap Anggaran (X1)	31116.553	856899.587	.011	2.036	.021
1 Profitabilitas (X2)	4403636.521	3652328.618	.388	2.206	.023
1 Liabilitas (X3)	79371.988	173675.727	.069	2.457	.049

a. Dependent Variable: Laporan Opini Audit (Y)

Tabel 8 Hasil Uji Regresi linier berganda
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2800604243421 38060000.000	3	9335347478071 2680000.000	4.552	.006 ^b
Residual	1148352168761 475200000.000	5	2050628872788 3485000.000		
Total	1428412593103 613200000.000	5			

a. Dependent Variable: Laporan Opini Audit (Y)

b. Predictors: (Constant), Liabilitas (X3), Daya Serap Anggaran (X1), Profitabilitas (X2)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.388	.382	4528386989.633 67

a. Predictors: (Constant), Liabilitas (X3), Daya Serap Anggaran (X1), Profitabilitas (X2)

b. Dependent Variable: Laporan Opini Audit (Y)